



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI KINERJA

2025

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja (RENAKSI) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun 2025, yang memuat Target Kinerja BP3KP Kalimantan I serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun khususnya tahun anggaran 2025.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I memuat gambaran Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, esensi penyusunan Rencana Aksi Kinerja, tugas dan fungsi entitas, struktur organisasi, dan isu strategis yang dihadapi pada lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Kemudian dokumen ini juga membahas mengenai penetapan kinerja yang terdiri dari penetapan target kinerja setiap triwulan. Dalam setiap pembahasan, dokumen ini menggambarkan 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Kami berharap Rencana Aksi Kinerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I. Kami menyadari bahwa Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I Tahun Anggaran 2025 ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Aksi Kinerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini. Semoga Tuhan selalu menyertai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Pontianak, 11 Agustus 2025

Kepala

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kalimantan I,



[Signature]
M. Arifay Saini, S.T., M.Eng.
NIP. 197308272003121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	7
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	8
1.4. ISU STRATEGIS.....	9
BAB 2 PENETAPAN KINERJA	11
2.1. PENETAPAN TARGET	11
2.1.1. Penetapan Target di bawah Sekretariat Jenderal	11
2.1.2. Penetapan Target di bawah Ditjen Kawasan Permukiman.....	12
2.1.3. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan.....	13
2.1.4. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan.....	14
2.1.5. Penetapan Target di bawah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	15
BAB 3 PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Organisasi UPT	8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)	11
Tabel 2.2 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)	11
Tabel 2.3 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)	12
Tabel 2.4 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)	12
Tabel 2.5 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)	13
Tabel 2.6 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)	13
Tabel 2.7 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)	14
Tabel 2.8 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)	14
Tabel 2.9 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)	15
Tabel 2.10 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi UPT.....	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)	18
Lampiran 2 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)	19
Lampiran 3 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat Jenderal)	20
Lampiran 4 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretariat Jenderal)	21
Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)	22
Lampiran 6 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)	23
Lampiran 7 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Kawasan Permukiman)	24
Lampiran 8 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Kawasan Permukiman)	25
Lampiran 9 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)	26
Lampiran 10 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)	27
Lampiran 11 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perdesaan)	28
Lampiran 12 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perdesaan)	29
Lampiran 13 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)	30
Lampiran 14 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)	31
Lampiran 15 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perkotaan)	32
Lampiran 16 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perkotaan)	33
Lampiran 17 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)	34
Lampiran 18 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) ..	35



BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I merupakan langkah strategis untuk menjamin ketercapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). BP3KP Kalimantan I sebagai unit pelaksana teknis di wilayah Kalimantan khususnya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki mandat penting dalam mendukung kebijakan nasional terkait penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan permukiman baru yang berkelanjutan.

Secara khusus, latar belakang penyusunan rencana aksi ini didorong oleh beberapa faktor:

- a. Kebijakan Nasional dan Target RPJMN. Pemerintah menargetkan pengurangan *backlog* perumahan dan peningkatan kualitas permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Balai berperan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan tersebut di tingkat regional.
- b. Kondisi Wilayah Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah. Tantangan geografis berupa keterbatasan aksesibilitas, ketersediaan lahan, serta kebutuhan infrastruktur dasar menuntut adanya perencanaan kinerja yang adaptif dan kontekstual.
- c. Akuntabilitas dan Transparansi. Rencana aksi kinerja menjadi instrumen untuk memastikan setiap program dan kegiatan dapat diukur, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Koordinasi Lintas Sektor. Penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar hasil pembangunan lebih berdaya guna dan berkelanjutan.
- e. Optimalisasi Sumber Daya: Dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, rencana aksi kinerja berfungsi sebagai pedoman untuk memprioritaskan program yang paling berdampak, sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Aksi Kinerja bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengintegrasikan visi pembangunan nasional dengan kebutuhan lokal. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan operasional dalam mengarahkan kegiatan balai secara terukur, memperkuat peran strategis Kalimantan sebagai wilayah pengembangan baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Unit Pelaksana Teknis atau disingkat dengan UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT dalam hal ini secara khusus yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman secara teknis berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mempunyai tugas, yaitu:

- a. Melaksanakan penyediaan perumahan;
- b. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Melaksanakan pengembangan kawasan permukiman;
- d. Melaksanakan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan
- e. Melaksanakan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I sebagai UPT menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

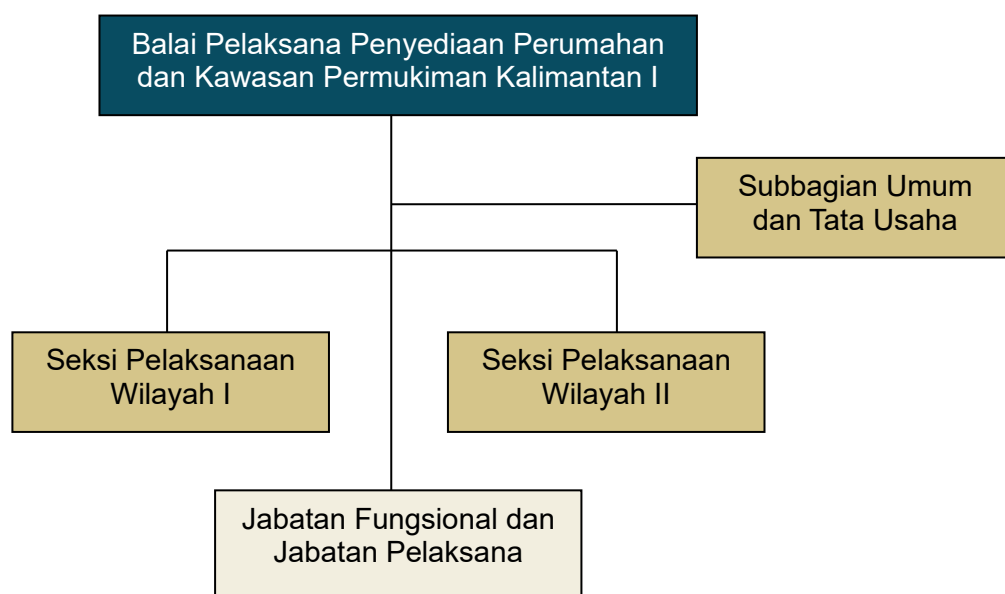
Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Tabel 1.1 Susunan Organisasi UPT

No.	Jabatan	Tugas
1	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
2	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai

		dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
3	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan



Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi UPT

1.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut dimensi kebijakan, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Pertama, tantangan kebijakan nasional berupa target pengurangan backlog perumahan dan penanganan kawasan kumuh menuntut balai untuk menyelaraskan program dengan RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, serta kebijakan daerah. Hal ini memerlukan konsistensi perencanaan, sinkronisasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Kedua, dari sisi sosial dan demografi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kalimantan menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan perumahan layak huni. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, sehingga diperlukan inovasi skema subsidi, kredit mikro, maupun kemitraan dengan lembaga keuangan. Selain itu, keberagaman budaya dan pola permukiman masyarakat lokal menuntut pendekatan pembangunan yang adaptif dan inklusif.

Ketiga, dari aspek ekonomi dan pembiayaan, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi isu strategis yang harus diatasi melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi program, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Fluktuasi harga material konstruksi juga berpotensi meningkatkan biaya pembangunan, sehingga strategi pengadaan dan distribusi material harus dirancang dengan cermat.

Keempat, dari perspektif lingkungan dan tata ruang, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan serta potensi konflik penggunaan lahan dengan sektor lain (perkebunan, kehutanan, industri) menjadi tantangan besar. Selain itu, risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor mengancam keberlanjutan permukiman. Oleh karena itu, penataan kawasan harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mitigasi risiko bencana, serta perlindungan lingkungan hidup.

Kelima, sinergi kelembagaan dan tata kelola menjadi isu strategis yang krusial. Keberhasilan program perumahan dan permukiman tidak dapat dicapai hanya oleh Kementerian PKP melalui BP3KP Kalimantan I saja, melainkan membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja harus diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program.

Dengan demikian, isu strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I mencakup tantangan multidimensi yang menuntut pendekatan holistik, integratif, dan adaptif. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja harus mampu menjawab isu-isu tersebut melalui strategi yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.



BAB II

PENETAPAN KINERJA



BAB 2

PENETAPAN KINERJA

2.1. PENETAPAN TARGET

Target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I ditetapkan dalam periode triwulan I, II, III, dan IV. Penetapan target kinerja tersebut merujuk pada Dokumen Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I Tahun Anggaran 2025. Berikut ini penetapan target kinerja yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok berdasarkan unit organisasi Sekretariat Jenderal, Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perumahan Perdesaan, Ditjen Perumahan Perkotaan, serta Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

2.1.1. Penetapan Target di bawah Sekretariat Jenderal

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Sekretariat Jenderal merujuk pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I yang ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2025. Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 menunjukkan masing-masing Rekapitulasi dan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Sekretariat Jenderal)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
			2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Dukungan Manajemen		Layanan	3	1,894,208	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal							
1	IKK : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	3	1,894,208	10%	30%	70%	100%

Tabel 2.2 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Sekretariat Jenderal)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR / KRO / RO			SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
					2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Dukungan Manajemen				Layanan	3	1,894,208	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal										
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal										
IKK : Jumlah Layanan Dukungan Manajemen				Layanan	3	1,894,208				
		KRO 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	3	1,894,208				
		RO EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	1,894,208	10%	30%	70%	100%
					1	972,208				
					1	455,119				
					1	466,881				

Pada Program Dukungan Manajemen ditetapkan target 3 (tiga) Layanan dengan keluaran berupa Layanan Perkantoran dengan total anggaran sebesar 1.894.208.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah). Adapun Layanan tersebut mencakup unit kerja BP3KP Kalimantan I beserta Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah, dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 10%, 30%, 70%, hingga 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2025.

2.1.2. Penetapan Target di bawah Ditjen Kawasan Permukiman

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Kawasan Permukiman merujuk pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I yang ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2025. Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 menunjukkan masing-masing Rekapitulasi dan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Kawasan Permukiman)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
			2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rekomendasi Kebijakan, Laporan	2	205,208	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman								
	SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni							
	IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	50,000	10%	30%	70%	100%
	IKK : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	155,208	10%	30%	70%	100%

Tabel 2.4 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Kawasan Permukiman)

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR / KRO / RO			SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
						2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					Rekomendasi Kebijakan, Laporan	2	205,208	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman					Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	50,000				
		KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	50,000				
		RO	PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	50,000	10%	30%	70%	100%
Balai P3KP Kalimantan I						1	50,000				
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja					Laporan	1	155,208				
		KRO	7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	1	155,208				
		RO	FAE.001	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	155,208	10%	30%	70%	100%
Balai P3KP Kalimantan I						1	155,208				

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan / Laporan dengan total anggaran sebesar 205.208.000 (Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja tersebut yaitu; 1) Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 2) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja. Target kinerja yang ditetapkan tersebut hanya berada pada unit kerja BP3KP Kalimantan I (tanpa Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah), dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 10%, 30%, 70%, hingga 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2025.

2.1.3. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perdesaan merujuk pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I yang ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2025. Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 menunjukkan masing-masing Rekapitulasi dan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.5 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Perumahan Perdesaan)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
			2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Kegiatan,	4	8,866,478	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		Laporan, Unit						
	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan							
	IKK : Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	316,684	10%	30%	70%	100%
	IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	212,244	10%	30%	70%	100%
	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan							
	IKK : Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	1	8,337,550	10%	30%	70%	100%

Tabel 2.6 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Perumahan Perdesaan)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR / KRO / RO	SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
			2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Kegiatan,	4	8,866,478	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		Laporan, Unit						
	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan							
	IKK : Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	316,684				
	KRO 7660.AEA Koordinasi	Kegiatan	1	316,684				
	RO AEA.001 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	316,684	10%	30%	70%	100%
	Balai P3KP Kalimantan I		1	316,684				
	IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	212,244				
	KRO 7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	2	212,244				
	RO FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	212,244	10%	30%	70%	100%
	Balai P3KP Kalimantan I		-	-				
	Satker PKP Provinsi Kalbar		1	106,975				
	Satker PKP Provinsi Kalteng		1	105,269				
	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perdesaan							
	IKK : Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	1	8,337,550				
	KRO 7660.CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Unit	1	8,337,550				
	RO CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	Unit	1	8,337,550	10%	30%	70%	100%
	Satker PKP Provinsi Kalbar		1	8,337,550				
	Satker PKP Provinsi Kalteng		-	-				

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 4 (empat) Kegiatan/Laporan/Unit dengan total anggaran sebesar 8.866.478.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja tersebut yaitu: 1) Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan; 2) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan; dan 3) Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan. Beberapa dari target kinerja yang ditetapkan tersebut berada pada unit kerja BP3KP Kalimantan I beserta Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah, dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 10%, 30%, 70%, hingga 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2025.

2.1.4. Penetapan Target di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan merujuk pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I yang ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2025. Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 menunjukkan masing-masing Rekapitulasi dan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.7 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Perumahan Perkotaan)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
			2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rekomendasi kebijakan, Laporan, Unit	51	20,331,798	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
	IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan /	1	105,127	10%	30%	70%	100%
	IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	3	254,371	10%	30%	70%	100%
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
	IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000	10%	30%	70%	100%
	IKK : Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	43	19,872,300	10%	30%	70%	100%
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
	IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000	10%	30%	70%	100%
	IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadava di Perkotaan	Unit	2	40,000	10%	30%	70%	100%

Tabel 2.8 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Perumahan Perkotaan)

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR / KRO / RO			SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
						2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					Rekomendasi kebijakan, Laporan, Unit	51	20,331,798	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan											
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	105,127				
		KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	105,127				
		RO	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	105,127	10%	30%	70%	100%
				Balai P3KP Kalimantan I		1	105,127				
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					Laporan	3	254,371				
		KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan	3	254,371				
		RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	254,371	10%	30%	70%	100%
				Balai P3KP Kalimantan I		1	85,055				
				Satker PKP Provinsi Kalbar		1	85,520				
				Satker PKP Provinsi Kalteng		1	83,796				
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan					Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000				
		KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000				
		RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Permbangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000	10%	30%	70%	100%
				Balai P3KP Kalimantan I		1	30,000				
IKK : Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan					Unit	43	19,872,300				
		KRO	7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Unit	43	19,872,300				
		RO	CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	43	19,872,300	10%	30%	70%	100%
				Satker PKP Provinsi Kalbar		-	-				
				Satker PKP Provinsi Kalteng		43	19,872,300				

SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan												
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000				
		KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000					
		RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	30,000	10%	30%	70%	100%	
Balai P3KP Kalimantan I							1	30,000				
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan						Unit	2	40,000				
		KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	Unit	2	40,000					
		RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	2	40,000	10%	30%	70%	100%	
Satker PKP Provinsi Kalbar							1	20,000				
Satker PKP Provinsi Kalteng							1	20,000				

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 51 (lima puluh satu) Rekomendasi Kebijakan/Laporan/Unit dengan total anggaran sebesar 20.331.798.000 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja tersebut yaitu: 1) Kebijakan Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; 2) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan; 3) Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan; 4) Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan; 5) Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan; dan 6) Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan. Beberapa dari target kinerja yang ditetapkan tersebut berada pada unit kerja BP3KP Kalimantan I beserta Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah, dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 10%, 30%, 70%, hingga 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2025.

2.1.5. Penetapan Target di bawah Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Penetapan Target Kinerja pada kegiatan di bawah Ditjen Perumahan Perkotaan merujuk pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I yang ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2025. Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 menunjukkan masing-masing Rekapitulasi dan Rincian Target Capaian Kinerja per triwulan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Penetapan Target Kinerja TA.2025 BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
			2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rekomendasi Kebijakan / Laporan	2	303,466	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Dukungan kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efektif dan Akuntabel							
	IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	129,233	10%	30%	70%	100%
	SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Dukungan kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	174,233	10%	30%	70%	100%

Tabel 2.10 Rincian Target Capaian TA.2025 BP3KP Kalimantan I
(Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR				SATUAN	TARGET PK	ANGGARAN (Rp x1.000)	Target Capaian Per Triwulan			
						2025	2025	TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
PROGRAM : Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					Rekomendasi Kebijakan / Laporan	2	303,466	10%	30%	70%	100%
KEGIATAN : Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman											
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Dukungan kebijakan Keterbukaan Publik Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efektif dan Akuntabel											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas					Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	129,233				
		KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	129,233				
		RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	129,233	10%	30%	70%	100%
Balai P3KP Kalimantan I						1	129,233				
SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya Dukungan kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan / Laporan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi					Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	174,233				
		KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	174,233				
		RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan / Laporan	1	174,233	10%	30%	70%	100%
Balai P3KP Kalimantan I						1	174,233				

Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan target 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan/Laporan dengan total anggaran sebesar 303.466.000 (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun keluaran dari target kinerja tersebut yaitu: 1) Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; serta 2) Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi. Target kinerja yang ditetapkan tersebut hanya ada pada unit kerja BP3KP Kalimantan I (tanpa Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat dan Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah), dengan target capaian per triwulan ditetapkan sebesar 10%, 30%, 70%, hingga 100% untuk masing-masing Triwulan I, II, III, dan IV Tahun Anggaran 2025.



BAB III

PENUTUP



BAB 3

PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja (RENAKSI) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I disusun sebagai dokumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai wujud komitmen kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunan rencana ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah, mulai dari *backlog* perumahan, keterbatasan lahan, hingga kebutuhan penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih jauh, dokumen ini menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, sehingga setiap langkah yang diambil oleh balai dapat mendukung pencapaian target RPJMN, Renstra Kementerian PKP, serta rencana pembangunan daerah. Rencana aksi ini juga menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, karena penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi rencana aksi bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Selain itu, rencana aksi ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi kinerja menjadi bagian integral untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas, balai dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan solusi yang lebih efektif di masa mendatang.

Pada akhirnya, Rencana Aksi Kinerja ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan profesional untuk menghadirkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan. Penutup ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi rencana aksi akan menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan publik di bidang perumahan, sekaligus menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dengan semangat kebersamaan, integritas, dan inovasi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I bertekad untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan.



LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

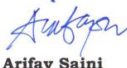
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama


Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	3 Layanan

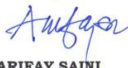
KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Rp 972,208,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Rp 455,119,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Rp 466,881,000.00
	Rp 1,894,208,000.00

Jakarta, 01 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I


ARIFAY SAINI

Lampiran 2 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Sekretariat Jenderal)

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691409/2025	 DS.2041-7526-7581-0534																																																																				
		Revisi ke 02 Tanggal : 14 Juli 2025																																																																				
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: <table style="width: 100%;"><tr><td>1. Kementerian Negara/Lembaga</td><td>: (146)</td><td>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</td></tr><tr><td>2. Unit Organisasi</td><td>: (01)</td><td>SEKRETARIAT JENDERAL</td></tr><tr><td>3. Provinsi</td><td>: (13)</td><td>KALIMANTAN BARAT</td></tr><tr><td>4. Kode/Nama Satker</td><td>: (691409)</td><td>Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I</td></tr><tr><td>Sebesar</td><td>: Rp.</td><td>972.208.000 (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)</td></tr></table> Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan : <table style="width: 100%;"><tr><td>146.01.WA</td><td>Program Dukungan Manajemen</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">Jumlah Uang</td></tr><tr><td>146.01.WA</td><td>Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">972.208.000</td></tr></table> C. Sumber Dana Berasal Dari : <table style="width: 100%;"><tr><td>1. Rupiah Murni</td><td>Rp.</td><td>972.208.000</td><td>4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>2. PNB</td><td>Rp.</td><td></td><td>- Pinjaman Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- PNB TA Berjalan</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>5. Hibah Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Dalam Negeri Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>6. SBSN PBS</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr></table> D. Pencairan dana dilakukan melalui : <table style="width: 100%;"><tr><td>1. KPPI PONTIANAK</td><td>(042) Rp.</td><td>972.208.000</td></tr></table> E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.			1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL	3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT	4. Kode/Nama Satker	: (691409)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Sebesar	: Rp.	972.208.000 (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)	146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	Jumlah Uang	146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	972.208.000	1. Rupiah Murni	Rp.	972.208.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0				5. Hibah Langsung	Rp.	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	1. KPPI PONTIANAK	(042) Rp.	972.208.000
1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																																																				
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL																																																																				
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT																																																																				
4. Kode/Nama Satker	: (691409)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I																																																																				
Sebesar	: Rp.	972.208.000 (SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)																																																																				
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	Jumlah Uang																																																																			
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.	972.208.000																																																																			
1. Rupiah Murni	Rp.	972.208.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																																	
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																																																	
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																																	
			5. Hibah Langsung	Rp.	0																																																																	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																																																	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0																																																																	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0																																																																	
1. KPPI PONTIANAK	(042) Rp.	972.208.000																																																																				
		Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002																																																																				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.01.1.691409/2025 I A. INFORMASI KINERJA		 DS.2041-7526-7581-0534	
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT Kode/Nama Satker : (691409) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I			
		Halaman : I A. 1	
Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	972.208.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	972.208.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal	
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan 972.208.000
Rincian Output	: 01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00 972.208.000
		Jakarta, 02 Desember 2024 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ttd. Maruarar Sirait	

Lampiran 3 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Sekretariat Jenderal)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691410/2025



DS.7005-3520-3561-3079

Revisi ke 02
Tanggal : 14 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT

4. Kode/Nama Satker : (691410) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Sebesar : Rp. 455.119.000 (EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA Program Dukungan Manajemen

146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

				Jumlah Uang	
	Rp.		Rp.		
C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	455.119.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.			Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :					
1. KPPN PONTIANAK	(042) Rp.	455.119.000			
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)					
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).					
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).					
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.					
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.					
5. Tanggung Jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.					
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).					
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691410/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS.7005-3520-3561-3079

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT

Kode/Nama Satker : (691410) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

				Halaman : I A. 1	
Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen			455.119.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			455.119.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	455.119.000
Rincian Output	: 01 : EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	455.119.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

td.
Maruarar Sirait

Lampiran 4 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Sekretariat Jenderal)

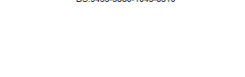
	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691411/2025			
A. Dasar Hukum:		Revisi ke 02 Tanggal : 12 Juli 2025	
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025			
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:			
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL			
3. Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH			
4. Kode/Nama Satker : (691411) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah			
Sebesar : Rp. 466.881.000 (EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)			
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :			
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :			
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA			
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			
146.01.WA Program Dukungan Manajemen			
146.01.WA. Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			
C. Sumber Dana Berasal Dari :			
1. Rupiah Murni Rp. 466.881.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0			
2. PNBP - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0			
- PHBP TA Berjalan Rp. 0			
5. Hibah Langsung Rp. 0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0			
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0			
- Hibah Luar Negeri Rp. 0			
- Hibah Dalam Negeri Rp. 0			
4. SBSN PBS Rp. 0			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN PALANGKARAYA (043) Rp. 466.881.000			
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)			
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).			
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).			
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.			
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.			
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.			
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).			
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.			
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003211995031002			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 146.01.1.691411/2025

I A. INFORMASI KINERJA



DIS:9433-3880-1045-8510

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH

Kode/Nama Satker : (691411) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

				Halaman : I A. 1
Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen		466.881.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		466.881.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Penurunan Waktu dan Biaya dalam Pengelolaan Penyelenggaraan Sekretariat Jenderal		
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7665.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	466.881.000
Rincian Output	: 01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	466.881.000

Jakarta, 02 Desember 2024

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.

Maruarar Sirait

Lampiran 5 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Agustus 2025


Fitrah Nur
 NIP. 19670419 199403 1 003


Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	2 Laporan
		4 Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1282 Unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	5 Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	19,92 Hektar

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

1	Rp	535,508,000.00
2	Rp	41,516,770,000.00
3	Rp	-
	Rp	42,052,278,000.00

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

ARIFAY SAINI

Lampiran 6 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Kawasan Permukiman)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691463/2025



DS.8094-1200-0098-9252

Revisi ke 03
 Tanggal : 15 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691463)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
Sebesar	: Rp.	535.508.000 (LIMA RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

146.03.IA.7659 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

							Jumlah Uang
						Rp.	
						Rp.	535.508.000
						Rp.	535.508.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	535.508.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 535.508.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691463/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS.8094-1200-0098-9252

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT

Kode/Nama Satker : (691463) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Halaman : I A. 1

Program							
Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					535.508.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman					535.508.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,00	Laporan, Layanan			485.508.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1,00	Laporan			155.208.000
	: 02 FAE.003	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00	Laporan			330.300.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian			50.000.000
Rincian Output	: 01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,00	Rekomendasi Kebijakan			50.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

 ttd.
 Maruarar Sirait

Lampiran 7 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Kawasan Permukiman)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691464/2025



053611-6743-8220-8034

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode>Nama Satker	: (691464)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Sebesar	: Rp. 41.516.770.000	(EMPAT PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.	41.516.770.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	41.516.770.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.		- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK	(042) Rp.	41.516.770.000
-------------------	-----------	----------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 03

Tanggal : 15 Agustus 2025

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.

LUKY ALFIRMAN

NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691464/2025
I A. INFORMASI KINERJA


DS.9811-6743-8220-8034

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 Kode>Nama Satker : (691464) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Halaman : I A. 1

Program	:	146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		41.516.770.000
Kegiatan	:	7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		41.516.770.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7659.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan	120.079.000
Rincian Output		:	01 FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1,00 Laporan	120.079.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7659.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1.301.92 unit, Hektar	41.396.691.000
Rincian Output		:	01 RBB.003 Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman (PN)	1282.00 unit	28.060.167.000
		:	02 RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh (PN)	19.92 Hektar	13.336.524.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

 ttd.
 Manuara Sirait

Lampiran 8 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Kawasan Permukiman)

(DIPA Belum Terbit)

Lampiran 9 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Imran
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 01 Agustus 2025

Pihak Pertama



Arifay Saini
NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
		2 Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	3 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1 Unit

KEGIATAN

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	316,684,000.00
Rp	8,444,525,000.00
Rp	105,269,000.00
Rp	8,866,478,000.00

Jakarta, 01 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



ARIFAY SAINI

Lampiran 10 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perdesaan)

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691517/2025	 DS: 3932-7451-5720-0876																																																														
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">1. Kementerian Negara/Lembaga</td><td style="width: 10%;">: (146)</td><td style="width: 60%;">KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</td></tr><tr><td>2. Unit Organisasi</td><td>: (04)</td><td>DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN</td></tr><tr><td>3. Provinsi</td><td>: (13)</td><td>KALIMANTAN BARAT</td></tr><tr><td>4. Kode/Nama Satker</td><td>: (691517)</td><td>Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I</td></tr><tr><td>Sebesar</td><td>: Rp. 316.684.000</td><td>(TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)</td></tr></table> Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsional dan Sub Fungsional : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 70%;">146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td><td style="width: 20%; text-align: right;">Jumlah Uang</td></tr><tr><td>146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">316.684.000</td></tr></table> C. Sumber Dana Berasal Dari : <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">1. Rupiah Murni</td><td style="width: 10%;">Rp.</td><td style="width: 30%;">316.684.000</td><td style="width: 30%;">4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td><td style="width: 10%;">Rp.</td><td style="width: 10%;">0</td></tr><tr><td>2. PNBP</td><td>Rp.</td><td></td><td>- Pinjaman Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- PNBP TA Berjalan</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Dalam Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>5. Hibah Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td><td>- Hibah Dalam Negeri Langsung</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>6. SBSN PBS</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr></table> D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 316.684.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.		1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT	4. Kode/Nama Satker	: (691517)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I	Sebesar	: Rp. 316.684.000	(TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)	146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	316.684.000	1. Rupiah Murni	Rp.	316.684.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0				6. SBSN PBS	Rp.	0
1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																																														
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN																																																														
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT																																																														
4. Kode/Nama Satker	: (691517)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I																																																														
Sebesar	: Rp. 316.684.000	(TIGA RATUS ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)																																																														
146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang																																																														
146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	316.684.000																																																														
1. Rupiah Murni	Rp.	316.684.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																											
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																																											
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																											
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0																																																											
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																																											
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0																																																											
			6. SBSN PBS	Rp.	0																																																											
		Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002																																																														

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.04.1.691517/2025 I A. INFORMASI KINERJA				 DS: 3932-7451-5720-0876
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT Kode/Nama Satker : (691517) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I				
Halaman : I A. 1				
Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	316.684.000	
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	316.684.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan		
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan		
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan		
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan		
	: 5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen		
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7660.AEA	Koordinasi	1,00 kegiatan 316.684.000	
Rincian Output	: 01	AEA.001 Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00 kegiatan 316.684.000	
Jakarta, 02 Desember 2024 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ttd. Maruarar Sirait				

Lampiran 11 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perdesaan)

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691518/2025	 DS.0900-8307-3069-0005																																																															
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025		Revisi ke 03 Tanggal : 14 Juli 2025																																																															
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">1. Kementerian Negara/Lembaga</td><td style="width: 10%;">: (146)</td><td style="width: 60%;">KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</td></tr><tr><td>2. Unit Organisasi</td><td>: (04)</td><td>DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN</td></tr><tr><td>3. Provinsi</td><td>: (13)</td><td>KALIMANTAN BARAT</td></tr><tr><td>4. Kode/Nama Satker</td><td>: (691518)</td><td>Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat</td></tr><tr><td>Sebesar</td><td>: Rp. 8.444.525.000</td><td>(DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)</td></tr></table> Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td><td style="width: 30%; text-align: right;">Jumlah Uang</td></tr><tr><td>146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">8.444.525.000</td></tr></table> C. Sumber Dana Berasal Dari : <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">1. Rupiah Murni</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td><td style="width: 30%; text-align: right;">8.444.525.000</td><td style="width: 30%;">4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td><td style="width: 30%; text-align: right;">0</td></tr><tr><td>2. PNBP</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td><td>- Pinjaman Dalam Negeri</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>- PNBP TA Berjalan</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td><td>- Hibah Dalam Negeri</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td><td>5. Hibah Langsung</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Luar Negeri</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td><td>- Hibah Luar Negeri Langsung</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>- Hibah Luar Negeri</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td><td>- Hibah Dalam Negeri Langsung</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>6. SBSN PBS</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr></table> D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPI PONTIANAK (042) Rp. 8.444.525.000 E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) - DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). - DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). - DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. - Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. - Tanggung Jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). - DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.			1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN	3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT	4. Kode/Nama Satker	: (691518)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Sebesar	: Rp. 8.444.525.000	(DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)	146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	8.444.525.000	1. Rupiah Murni	Rp.	8.444.525.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0		Rp.	0
1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																																															
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN																																																															
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT																																																															
4. Kode/Nama Satker	: (691518)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat																																																															
Sebesar	: Rp. 8.444.525.000	(DELAPAN MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)																																																															
146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang																																																															
146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.	8.444.525.000																																																															
1. Rupiah Murni	Rp.	8.444.525.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																												
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0																																																												
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0																																																												
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0																																																												
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0																																																												
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0																																																												
6. SBSN PBS	Rp.	0		Rp.	0																																																												
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002																																																																	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.04.1.691518/2025 I A. INFORMASI KINERJA						 DS.0900-8307-3069-0005
Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN				
Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT				
Kode/Nama Satker	: (691518)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat				
Halaman : I A. 1						
Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.444.525.000			
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	8.444.525.000			
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan				
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan				
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan				
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan				
	: 5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen				
Klasifikasi Rincian Output	1	: 7660.CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1,00	unit, Hektar	8.337.550.000	
Rincian Output	: 01	CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan	1,00	unit	8.337.550.000	
Klasifikasi Rincian Output	2	: 7660.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	106.975.000	
Rincian Output	: 01	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	106.975.000	
Jakarta, 02 Desember 2024 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ttd. Maruarar Sirait						

Lampiran 12 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perdesaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691519/2025



DS:7662-6855-5380-1628

Revisi ke 02
 Tanggal : 03 Juli 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (14)	KALIMANTAN TENGAH
4. Kode/Nama Satker	: (691519)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah
Sebesar	: Rp. 105.269.000	(SERATUS LIMA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	105.269.000
146.04.IA.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.		105.269.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	105.269.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PINBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPI PALANGKARAYA	(043) Rp.	105.269.000
----------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691519/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7662-6855-5380-1628

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Provinsi : (14) KALIMANTAN TENGAH

Kode/Nama Satker : (691519) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman : I A. 1

Program	: 146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	105.269.000
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	105.269.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perdesaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perdesaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perdesaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 07	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	

Klasifikasi Rincian Output	1	: 7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	105.269.000
Rincian Output	: 01	: FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	105.269.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
 Maruarar Sirait

Lampiran 13 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

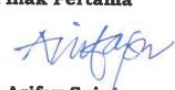
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua


Sri Haryati
 NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama


Arifay Saini
 NIP. 19730827 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	3 Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		4 Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	5 Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		6 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	2 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah

PAGU APBN

Rp	250,182,000.00
Rp	105,520,000.00
Rp	19,976,096,000.00
Rp	20,331,798,000.00

Jakarta, 01 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I

ARIFAY SAINI

Lampiran 14 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Perumahan Perkotaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691571/2025



DS 9047.1230-8810-8028

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691571)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I
Sebesar	: Rp. 250.182.000	(DUA RATUS LIMA PULUH JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang
146.05.1A.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	250.182.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	250.182.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PINBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK	(042) Rp.	250.182.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 02
 Tanggal : 14 Juli 2025

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691571/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS 9047.1230-8810-8028

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT

Kode/Nama Satker : (691571) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

			Halaman : I A. 1
Program	: 146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.182.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	250.182.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan	
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan	
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan	
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
	: 5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)	
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00 Rekomendasi Kebijakan 165.127.000
Rincian Output	: 01 ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Rekomendasi Kebijakan 105.127.000
	: 02 ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00 Rekomendasi Kebijakan 30.000.000
	: 03 ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00 Rekomendasi Kebijakan 30.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2 : 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 85.055.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan 85.055.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
 Maruarar Sirait

Lampiran 15 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Barat (Ditjen Perumahan Perkotaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691572/2025



DS-1142-3695-0180-0073

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (13)	KALIMANTAN BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (691572)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
Sebesar	: Rp.	105.520.000 (SERATUS LIMA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	105.520.000
146.05.1A.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.		105.520.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	105.520.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PINBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPI PONTIANAK	(042) Rp.	105.520.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Revisi ke 03
 Tanggal : 14 Juli 2025

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691572/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS-1142-3695-0180-0073

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT

Kode/Nama Satker : (691572) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Program		: 146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	105.520.000
Kegiatan		: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	105.520.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan		
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan		
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan		
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan		
	: 5. 05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)		
Klasifikasi Rincian Output	1	: 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 85.520.000
Rincian Output		: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan 85.520.000
Klasifikasi Rincian Output	2	: 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1,00 unit, Hektar 20.000.000
Rincian Output		: 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	1,00 unit 20.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ttd.
 Maruarar Sirait

Lampiran 16 Petikan DIPA Satker PKP Provinsi Kalimantan Tengah (Ditjen Perumahan Perkotaan)

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691573/2025	 DS.9319-5800-5214-6284																																										
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025		Revisi ke 03 Tanggal : 12 Juli 2025																																										
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">1. Kementerian Negara/Lembaga</td><td style="width: 10%;">: (146)</td><td style="width: 60%;">KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</td></tr><tr><td>2. Unit Organisasi</td><td>: (05)</td><td>DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN</td></tr><tr><td>3. Provinsi</td><td>: (14)</td><td>KALIMANTAN TENGAH</td></tr><tr><td>4. Kode/Nama Satker</td><td>: (691573)</td><td>Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah</td></tr><tr><td>Sebesar</td><td>: Rp. 19.976.096.000</td><td>(SEMBILAN BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)</td></tr></table> Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 146.05 IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 146.05 IA.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">C. Sumber Dana Berasal Dari :</td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 60%;"></td></tr><tr><td>1. Rupiah Murni</td><td>Rp.</td><td>19.976.096.000</td></tr><tr><td>2. PNBP</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>- PNBP TA Berjalan</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Pinjaman Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>- Hibah Luar Negeri</td><td>Rp.</td><td>0</td></tr><tr><td>D. Pencairan dana dilakukan melalui :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. KPPN PALANGKARAYA</td><td>(043) Rp.</td><td>19.976.096.000</td></tr></table> E. Pernyataan Syarat dan Kelentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.			1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	3. Provinsi	: (14)	KALIMANTAN TENGAH	4. Kode/Nama Satker	: (691573)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	Sebesar	: Rp. 19.976.096.000	(SEMBILAN BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)	C. Sumber Dana Berasal Dari :			1. Rupiah Murni	Rp.	19.976.096.000	2. PNBP	Rp.		- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	D. Pencairan dana dilakukan melalui :			1. KPPN PALANGKARAYA	(043) Rp.	19.976.096.000
1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																										
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN																																										
3. Provinsi	: (14)	KALIMANTAN TENGAH																																										
4. Kode/Nama Satker	: (691573)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah																																										
Sebesar	: Rp. 19.976.096.000	(SEMBILAN BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH)																																										
C. Sumber Dana Berasal Dari :																																												
1. Rupiah Murni	Rp.	19.976.096.000																																										
2. PNBP	Rp.																																											
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0																																										
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																										
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0																																										
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0																																										
D. Pencairan dana dilakukan melalui :																																												
1. KPPN PALANGKARAYA	(043) Rp.	19.976.096.000																																										
		Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002																																										

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.05.1.691573/2025 I A. INFORMASI KINERJA		 DS.9319-5800-5214-6284
Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Unit Organisasi : (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	
Provinsi : (14)	KALIMANTAN TENGAH	
Kode/Nama Satker : (691573)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah	
		Halaman : I A. 1
Program : 146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.976.096.000
Kegiatan : 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	19.976.096.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1.01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan	
2.02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan	
3.03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan	
4.04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	
5.05	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)	
Klasifikasi Rincian Output 1 : 7661.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	43,00 unit, Hektar 19.872.300.000
Rincian Output : 01 CBB.001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	43,00 unit 19.872.300.000
Klasifikasi Rincian Output 2 : 7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan 83.796.000
Rincian Output : 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00 Laporan 83.796.000
Klasifikasi Rincian Output 3 : 7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	1,00 unit, Hektar 20.000.000
Rincian Output : 01 RBB.008	Rumah Swadaya Perkotaan (PN)	1,00 unit 20.000.000
		td. Maruarar Sirait

Lampiran 17 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arifay Saini**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



Arifay Saini
NIP. 197308272003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN**PAGU APBN**

- 1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rp

303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**



AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN I**



ARIFAY SAINI

Lampiran 18 Petikan DIPA BP3KP Kalimantan I (Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691606/2025	 DS 5555-6064-6597-8085
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025			Revisi ke 02 Tanggal : 14 Juli 2025
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:			
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT			
4. Kode/Nama Satker : (691606) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I			
Sebesar : Rp. 303.466.000 (TIGA RATUS TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH)			
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :			
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :			
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM			
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA			
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :			
146.06.IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
146.06.IA.7662 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
C. Sumber Dana Berasal Dari :			Jumlah Uang
1. Rupiah Murni Rp. 303.466.000			Rp. 303.466.000
2. PNBP Rp. 0			Rp. 303.466.000
- PNBP TA Berjalan Rp. 0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0			
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0			
- Hibah Luar Negeri Rp. 0			
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0			
- Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0			
- Hibah Dalam Negeri Rp. 0			
5. Hibah Langsung Rp. 0			
- Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0			
- Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0			
6. SBSN PBS Rp. 0			
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			
1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 303.466.000			
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)			
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).			
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).			
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.			
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.			
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.			
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).			
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.			
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN			
ttd. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271995031002			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : DIPA- 146.06.1.691606/2025 I A. INFORMASI KINERJA						 DS 5555-6064-6597-8085
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT						
Kode/Nama Satker : (691606) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I						
						Halaman : I A. 1
Program		: 146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000	
Kegiatan		: 7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		303.466.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. 01	Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan skema pembiayaan alternatif yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau			
		: 2. 02	Tersusunnya NSPK yang mendukung tersedianya hunian yang layak dan terjangkau			
		: 3. 03	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi standar keandalan bangunan (Kab/Kota)			
		: 4. 04	Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan infrastruktur perumahan yang siap dikerjasamakan (%)			
Klasifikasi Rincian Output		1	: 7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00 Rekomendasi Kebijakan 303.466.000	
Rincian Output		: 01	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1,00 Rekomendasi Kebijakan 129.233.000	
		: 02	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1,00 Rekomendasi Kebijakan 174.233.000	
Jakarta, 02 Desember 2024 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
ttd. Maruarar Sirait						



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN I



Jl. Imam Bonjol No.116, Benua Melayu Darat, Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat



bp3kp.kalimantan1@pkp.go.id